

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Wacana perdagangan bebas pada sektor pertanian sudah menjadi perundingan yang panjang dan melelahkan. Terhitung sejak akhir tahun 2001 isu perdagangan internasional tersebut dimulai. *Doha Development Agenda* menjadi titik awal proses perundingan dan negosiasi di antara negara-negara anggota WTO. Namun, kesepakatan tidak kunjung dihasilkan antara mereka hingga akhir tahun 2005. Hal ini dikarenakan masing-masing negara anggota tetap mempertahankan posisinya untuk mengedepankan kepentingan nasional, tanpa ada kompromi atas isu tersebut.

Kebulatan tekad Komisi Eropa untuk tetap mempertahankan kebijakan pertanian Eropa yang menjadi batu sandungan program WTO itu tidak berjalan dengan semestinya. Kebijakan pertanian negara-negara anggota UE tersebut yang kemudian disebut sebagai *Common Agriculture Policy (CAP)*. CAP menuai kontroversi di forum perundingan dan negosiasi tingkat WTO karena kebijakan subsidi dan bantuan domestik yang diterapkan oleh UE bagi seluruh sektor pertanian negara-negara anggota UE. Dalam perdagangan internasional, guna mencapai perdagangan yang adil dan sempurna, maka sepatutnya bantuan kebijakan subsidi dan bantuan domestik tersebut dihapuskan dari praktek perdagangan internasional tersebut. Melalui bantuan semacam itu, kegiatan perekonomian melalui perdagangan tidak dapat menemui mekanisme yang adil.

Protes keras berasal dari negara-negara berkembang. Mereka merasa dengan diberlakukannya CAP di wilayah UE, maka perdagangan internasional sektor pertanian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Negara berkembang menyadari bahwa bantuan subsidi yang tetap diberikan kepada negara-negara anggota WTO akan merusak berjalannya wacana perdagangan bebas pada sektor pertanian. Produk-produk yang berasal dari negara-negara berkembang tidak dapat bersaing dengan produk-produk negara UE. Dengan demikian, negara berkembang khawatir jika Komisi Eropa tetap mempertahankan kebijakan

pertaniannya tersebut, maka sektor pertanian negara berkembang hanya tinggal tunggu waktu untuk hancur karena tidak dapat berkompetisi dengan produk-produk UE yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat diraih oleh petani-petani Eropa karena adanya bantuan subsidi yang sangat besar untuk kegiatan produksi dan bantuan teknis di sektor tersebut.

Akan tetapi hingga tahun 2005, Komisi Eropa tetap dapat mempertahankan kebijakan pertaniannya tersebut pada forum WTO. Sikap Komisi Eropa dengan tetap mempertahankan posisinya tersebut dapat membuntukan (*deadlock*) perundingan perdagangan bebas sektor pertanian beberapa kali pada konferensi tingkat tinggi UE (*Ministerial Meeting Cancun 2003* dan *Ministerial Meeting Hongkong 2005*). *Doha Development Agenda* yang tidak terselesaikan tersebut menekankan kepada komitmen bersama negara-negara anggota WTO terhadap isu akses pasar, subsidi ekspor dan bantuan domestik. Disamping itu, terdapat pembicaraan yang berkenaan juga dengan perlakuan terhadap negara berkembang.

Secara garis besar, Komisi Eropa memosisikan diri untuk selalu menolak dalam melakukan pemenuhan komitmen Doha dan mengubah secara besar-besaran pada kebijakan pertaniannya. Hingga sampai tahun 2005 (periode terakhir pada penelitian ini), Komisi Eropa mengeluarkan penawaran terakhir terkait dengan isu pertanian ini pada negosiasi tingkat WTO. Untuk pertama kalinya, Komisi Eropa memosisikan diri bahwa setuju untuk melakukan pengurangan bantuan dalam bentuk apapun, tetapi dilakukan secara berkala, serta tidak dihilangkan seluruhnya. Akan tetapi, perubahan yang dilakukan oleh Komisi Eropa tersebut, tidak terlihat cukup signifikan dan berpengaruh terhadap perdagangan pertanian internasional, dipandang oleh anggota WTO yang lain. Kebijakan pertanian Eropa yang tertuang dalam pilar pertama UE merupakan suatu kebijakan yang sangat penting bagi kepentingan Komisi Eropa dan negara-negara anggota UE. Dengan kata lain, Komisi Eropa sangat berhati-hati di dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian tersebut. Komisi Eropa sudah pasti memiliki suatu ketentuan dan kepastian terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam pilar pertama tersebut terutama pada sektor pertaniannya. Ketentuan tersebut yang dapat memberikan batasan terhadap

Komisi Eropa sampai sejauh mana ketentuan-ketentuan yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut dapat dirundingkan dan dinegosiasikan. Berdasarkan dari seluruh proposal yang menunjukkan posisi Komisi Eropa dalam perundingan pertanian tersebut, sehingga dapat diidentifikasi posisi UE untuk dapat memenuhi dan tidak dapat memenuhi komitmen bersama yang ada dalam agenda Doha.

Berdasarkan identifikasi isu-isu dari agenda Doha, dapat dilihat perbedaan sikap dari Komisi Eropa untuk memenuhi ataupun tidak memenuhi mandat tersebut. Pola identifikasi membuktikan bahwa untuk agenda perundingan WTO yang dapat dipenuhi oleh Komisi Eropa yakni mengenai *market access*, *non-trade concerns*, dan *developing countries / special and differential action*, merupakan isu-isu yang tidak memiliki dampak yang berskala besar terhadap kondisi perekonomian UE secara langsung. Hal ini terbukti dengan proposal Komisi Eropa yang memiliki fleksibilitas terhadap agenda tersebut.¹

Sedangkan merujuk pada agenda Doha tentang *export subsidies* dan *domestic support*, dapat dilihat bahwa Komisi Eropa berkeras dan berjuang untuk tidak memenuhi tuntutan terhadap dua isu tersebut. Hal itu dapat diteliti sebagai dua permasalahan yang merupakan hal teknis yang sudah tercantum secara jelas dalam Pilar 1 UE, dimana sektor pertanian adalah suatu kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Komisi Eropa untuk mendanai dan mendukung produktifitas pertanian.² Subsidi ekspor dan bantuan domestik adalah dua hal pendukung dalam CAP yang sangat berperan penting dalam pertanian Eropa.

Sikap Komisi Eropa dalam perundingan WTO menanggapi permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung pada *deadlock* agenda Doha, merupakan suatu bukti dari tingkat kepentingan *export subsidies* dan *domestic support* dalam masyarakat Eropa. Kedua hal tersebut merupakan cerminan nyata dari permasalahan yang memiliki keabsahan secara teknis dan tidak bisa diganggu gugat dari eksternal Uni Eropa. Maka munculnya perlakuan yang berbeda terhadap isu-isu dalam Agenda Doha merupakan penentu arah diplomasi yang digunakan Eropa untuk mempertahankan CAP-nya dalam meja perundingan

¹ Lihat tabel 4.1, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa.

² Lihat bab 2, pada sub bab 2.2.1, mengenai pilar 1 Uni Eropa

WTO, yaitu melalui negosiasi teknis. Negosiasi teknis itu merupakan bentuk paling sesuai yang dapat diaplikasikan oleh Komisi Eropa untuk membawa kepentingan Eropa, yang pada kebijakannya merupakan hal teknis, untuk diperjuangkan di level WTO.

Melalui keseluruhan proses analisis, didapati bahwa uji hipotesis yang tercantum pada bab 1 yaitu keberhasilan diplomasi Komisi Eropa untuk mempertahankan CAP di forum WTO **melalui negosiasi teknis, adalah terbukti**. Dengan demikian, merupakan kewajiban Komisi Eropa untuk tetap memperjuangkan kepentingan konstituen domestiknya dengan cara apapun. Posisi yang kuat pada forum WTO adalah dukungan yang kuat dan solid dari berbagai perundingan yang dilakukan pada regional.

5.2. Rekomendasi

Terdapa tiga (3) rekomendasi yang muncul dari penelitian ini. Hal yang pertama berkaitan pada kurun waktu yang dapat dilakukan pada penelitian berikutnya. Penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian gaya diplomasi UE dalam kurun waktu lanjutan, yaitu 2006-2009. Pada kurun waktu tersebut mengingat bahwa kegiatan perundingan dan negosiasi sektor pertanian di forum WTO terus berlanjut, bahkan hingga sekarang ini.

Berdasarkan studi kasus yang terdapat dalam tesis ini, penulis menyadari akan pentingnya dokumen-dokumen resmi. Pengumpulan data dan informasi pada dokumen resmi tersebut berguna untuk mengetahui secara legal posisi dan sikap dari variabel yang menjadi pokok bahasan dalam tesis. Perlu dicari lebih mendalam dan lengkap lagi dokumen-dokumen yang ada dalam produk hukum untuk menyempurnakan temuan-temuan dokumen lainnya. Keberhasilan UE menjadi lembaga regional dan negosiasi UE sangat baik demi kepentingan yang hendak diperoleh oleh negara-negara anggota UE. UE dapat menjadi suatu lembaga regional yang memiliki kekuatan sangat besar di dunia internasional. Penulis merekomendasikan untuk penelitian berikutnya adalah dapat menjadikan keberhasilan UE sebagai lembaga regional yang sangat kuat sebagai *role model* Asean dalam memperkuat kapasitas regional.